

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Peran dan Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Yuli Santri Isma

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
24355

Korespondensi penulis: yisma@unimal.ac.id

Abstract. *Tourism development in Aceh Tengah Regency has great potential to become a leading tourist destination, especially with the natural beauty of Danau Laut Tawar and the richness of local culture. The Tourism Office of Aceh Tengah Regency has implemented various strategies, including the empowerment of local communities, infrastructure improvements, and tourism promotion. However, significant challenges remain in the development of this sector, such as the lack of land legality documents, limited supporting facilities, and low creativity in the creative economy products. Based on the research, development focusing on community empowerment through training, improvements in physical and social infrastructure, and strengthening collaboration between the government, private sector, and local communities can enhance tourism appeal and provide positive economic impacts. In the future, community-based and sustainable tourism development will be the key to creating an environmentally friendly and sustainable destination. Through more coordinated strategic efforts, it is expected that the tourism sector in Aceh Tengah can grow rapidly and contribute to regional development.*

Keywords: *Tourism development, Aceh Tengah, community empowerment, infrastructure, sustainable tourism.*

Abstrak. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan, terutama dengan keindahan alam Danau Laut Tawar dan kekayaan budaya lokal. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah telah mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan infrastruktur, serta promosi wisata. Meskipun demikian, masih terdapat kendala signifikan dalam pengembangan sektor ini, seperti kurangnya dokumen legalitas lahan, terbatasnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kreativitas produk ekonomi kreatif. Berdasarkan penelitian, pengembangan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, perbaikan infrastruktur fisik dan sosial, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Di masa depan, pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan keberlanjutan menjadi kunci utama untuk menciptakan destinasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui langkah strategis yang lebih terkoordinasi, diharapkan sektor pariwisata di Aceh Tengah dapat berkembang pesat dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kata kunci: Pengembangan pariwisata, Aceh Tengah, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, pariwisata berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor unggulan bagi banyak negara dalam meningkatkan sumber pendapatan selain dari sektor migas dan pajak. Saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang mulai gencar mempromosikan dirinya di kancah internasional. Upaya ini bertujuan agar Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dunia dan menarik minat mereka untuk berkunjung.

Sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Sebagai penghasil devisa utama, pariwisata turut berkontribusi dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam memperkuat identitas nasional dan melestarikan warisan budaya bangsa. Keberagaman sumber daya alam dan budaya Indonesia menjadi aset yang sangat berharga untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata.

Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam merupakan salah satu Daerah Tujuan Pariwisata (DTW) di Indonesia yang memiliki banyak potensi, selain panorama dan keindahan alam, iklim yang sejuk di beberapa daerah, Nanggroe Aceh Darusalam juga memiliki beragam adat istiadat, bahasa, dan kesenian, serta tempat-tempat maupun gedung bersejarah.

Keanekaragaman potensi dan kekayaan budaya yang dimiliki merupakan aset berharga yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Upaya pelestarian harus terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungannya di tengah ancaman kepedulian masyarakat yang semakin menurun. Meskipun demikian, pengembangan potensi wisata di Aceh Tengah masih belum merata. Masih banyak objek wisata menarik lainnya yang menanti untuk dikembangkan dan dipromosikan.

Agar pariwisata suatu daerah dapat bertahan dalam globalisasi maka diperlukan berbagai faktor pendukung diantaranya perlunya visi misi dan tujuan yang jelas; memiliki kekhususan dan kekhasan sesuai karakteristik daerah yang akan dibangun; perencanaan sumber daya manusia serta adanya manajemen operasional yang dapat mendukung pengembangan dan kualitas layanan (Soedarso, Sutikno and Sukardi, 2020).

Kabupaten Aceh Tengah khususnya, merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang memiliki potensi tidak kalah menarik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Dengan kekayaan alam dan budaya yang unik, Aceh Tengah tak hanya menjadi destinasi wisata favorit di Aceh, tetapi juga bersaing dengan daerah wisata lainnya di Indonesia. Berbagai objek wisata seperti wisata alam, agrowisata, dan wisata budaya siap menyambut para pengunjung.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pariwisata perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membenahi sektor pariwisata di Aceh Tengah dalam menghadapi era otonomi dan globalisasi. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata Utama, sehingga pariwisata dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi pembangunan daerah. Untuk mengembangkan potensi pariwisata dan menjadikannya sebagai produk unggulan yang kompetitif di pasar global, pemerintah harus merumuskan

strategi yang mendukung kemajuan destinasi wisata tersebut, khususnya "Danau Laut Tawar."

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dalam upaya mengembangkan potensi daerah tujuan wisata di Kabupaten Aceh Tengah, dengan fokus pada identifikasi program-program strategis, langkah-langkah implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penghasilan devisa (UNWTO, 2020). Dalam konteks Indonesia, sektor pariwisata menjadi unggulan karena keberagaman potensi budaya dan alamnya. Pada tahun 2023, sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pemulihan yang signifikan pasca-pandemi. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 3,9 persen pada tahun tersebut. Selain itu, devisa pariwisata mencapai 14 miliar dolar AS, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 11,68 juta, melebihi target awal yang berkisar antara 6 hingga 8,5 juta kunjungan.

Walker (2017), mengatakan pariwisata adalah jumlah total pengeluaran wisatawan dalam perbatasan suatu negara atau subdivisi politik atau kawasan ekonomi yang berpusat pada transportasi dari negara bagian atau bangsa yang berdekatan. Konsep ekonomi ini juga mempertimbangkan pengganda pendapatan ini pengeluaran wisatawan.

Pariwisata dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui cara-cara berikut (Burgess et al., 2011; Ollivaud and Haxton, 2019):

1. Generasi Pekerjaan Ini menciptakan banyak pekerjaan di antara penyedia layanan langsung (seperti hotel, restoran, agen perjalanan, operator tur, pemandu dan pendamping tur, dll.) Dan di antara penyedia layanan tidak langsung (seperti pemasok ke hotel dan restoran, akomodasi tambahan, dll.)
2. Pembangunan infrastruktur Pariwisata memacu pembangunan infrastruktur. Untuk menjadi tujuan komersial atau kesenangan yang penting, lokasi mana pun

akan membutuhkan semua infrastruktur yang diperlukan, seperti konektivitas yang baik melalui kereta api, jalan raya, dan transportasi udara, akomodasi yang memadai, restoran, jaringan telekomunikasi yang berkembang dengan baik, dan, fasilitas medis, di antaranya orang lain.

3. Pertukaran asing Orang-orang yang bepergian ke negara lain menghabiskan banyak uang untuk akomodasi, transportasi, tamasya, belanja, dll. Dengan demikian, turis yang masuk merupakan sumber devisa yang penting bagi negara manapun.

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Teori *Sustainable Tourism Development* (Butler, 1980) menjadi landasan penting dalam pengembangan pariwisata. Pendekatan ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, budaya, dan sosial secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak ekosistem setempat. Pendekatan ini relevan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Tengah yang kaya akan keindahan alam dan warisan budaya.

Dalam Sutiarto (2017), Pembangunan pariwisata hendaknya dilakukan secara terencana, arah kebijakan, dan strategi pengembangan pariwisata hendaknya dibuat selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan pariwisata secara nasional dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.

Konsep pariwisata berkelanjutan merupakan platform industri pariwisata di masa yang akan datang yang memperhatikan *quality, continuity dan balance*. Langkah dalam penerapan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah dengan melakukan kerja sama dan melibatkan seluruh stakeholder dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pembangunan pariwisata. Keberlanjutan juga dijelaskan sebagai penerapan sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang baik yang melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Indikator dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Khairunnisa adalah partisipasi, keikutsertaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akuntabilitas, promosi dan pelatihan (Khairunnisa, 2020).

Strategi

Strategi pengembangan pariwisata melibatkan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta (Dredge & Jenkins, 2017). Pemerintah berperan

sebagai regulator dan fasilitator dengan menyusun kebijakan dan menyediakan infrastruktur pendukung. Masyarakat lokal memainkan peran dalam pelestarian budaya dan tradisi, sementara sektor swasta berperan dalam investasi dan inovasi produk wisata.

Danau Laut Tawar merupakan destinasi wisata unggulan Kabupaten Aceh Tengah dengan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner. Namun, tantangan utama dalam pengembangan wisata daerah adalah kurangnya promosi, terbatasnya infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Secara umum, strategi pengembangan kawasan pariwisata dapat dibagi menjadi model konvensional dan non-konvensional. Pada model konvensional, pengembangan lebih berfokus pada aspek ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, model non-konvensional memiliki tujuan yang lebih beragam, tidak hanya berorientasi pada faktor ekonomi, tetapi juga mencakup aspek ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu, model non-konvensional cenderung menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis komunitas melalui berbagai upaya pelestarian adat dan budaya lokal. Pendekatan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa tanpa adanya harmoni dan partisipasi aktif dari masyarakat, pengelolaan pariwisata tidak akan dapat berjalan dengan optimal.

Dalam Ashoer, Muhammad (2021), menyatakan ada beberapa strategi yang bisa dijalankan dalam pengembangan pariwisata diantaranya adalah:

1. Pengembangan objek wisata. Misalnya dengan mengembangkan aplikasi pada telepon pintar yang bisa membantu dalam mencari akomodasi. Paket paket liburan juga harusnya bisa dikemas dalam satu produk sehingga wisatawan tidak lagi perlu mencari sendiri akomodasi yang mereka inginkan, namun tinggal mengikuti paket yang sudah disiapkan.
2. Promosi wisata. Strategi lain yang bisa dijalankan adalah dengan meningkatkan promosi. Dalam beberapa tahun terakhir memang telah terjadi perubahan dalam promosi budaya ini, di mana tujuan wisata adalah untuk merasakan budaya daerah lain. Wisata budaya ini termasuk mengunjungi tempat bersejarah, situs arkeologi, terlibat dalam berbagai festival komunitas, menonton tarian atau upacara tradisional atau sekedar berbelanja kerajinan tangan dari pengrajin lokal (Besculides, Lee and McCormick, 2002). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bentuk promosi seperti ini dapat memberikan keuntungan bagi warga lokal karena adanya pertukaran budaya juga menambah toleransi dan rasa kebanggaan masyarakat.

3. Pembuatan rencana jangka pendek maupun jangka panjang mengenai destinasi wisata. Rencana ini diperlukan untuk melihat bagaimana pengembangan wisata berhubungan dengan parameter ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang ada. Dengan adanya dokumen perencanaan yang mengukur manfaat ekonomi dari pariwisata daerah maka dapat pula diukur sejauh mana sektor ini mampu menyerap lapangan kerja.
4. Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sektor pariwisata ini seharusnya dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan khususnya perencanaan strategis yang melibatkan pemerintah sebagai stakeholder yang diintegrasikan ke dalam perencanaan destinasi pariwisata lokal. Semakin banyak destinasi yang mengadopsi perspektif strategis dan berkelanjutan maka hal tersebut akan semakin baik untuk pengembangan pariwisata. Hal ini harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah mengingat pada tingkat lokal inilah terdapat peluang untuk memitigasi dampak negatif pariwisata.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community-Based Tourism - CBT*)

Pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) dianggap solusi untuk mengatasi tantangan ini. CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata. Menurut Giampiccoli dan Saayman (2018), model ini mampu meningkatkan ekonomi lokal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sektor pariwisata. Di Aceh Tengah, penerapan kebijakan ini dapat diperkuat dengan melibatkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai penggerak utama. Strategi ini harus mencakup pengembangan produk wisata unggulan seperti Danau Laut Tawar, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.

Pitana (2015) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis komunitas menekankan pentingnya masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata, serta dalam pembuatan produk-produk wisata lokal yang bernilai tambah. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap aspek pengembangan, keberlanjutan pariwisata dapat lebih terjamin.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah terkait potensi pengembangan, strategi pengembangan, serta peran stakeholders dalam pengembangan Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi. Wawancara mendalam akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan potensi daerah tujuan wisata Danau Laut Tawar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi wisata yang sangat menarik, terutama di kawasan Danau Laut Tawar. Untuk memaksimalkan pengembangan sektor pariwisata tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerapkan berbagai strategi untuk merealisasikannya. Strategi yang diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata sejauh ini dianggap cukup efektif. Jika pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan secara optimal, hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Dinas Pariwisata telah merancang strategi pengembangan sektor pariwisata yang komprehensif. Strategi ini fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku usaha pariwisata, peningkatan kualitas sarana dan prasarana wisata, serta promosi wisata secara intensif. Langkah pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi kebutuhan wisatawan, seperti layanan hospitality, pengelolaan homestay, dan pengembangan produk lokal yang bernilai jual. Sementara itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana mencakup pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata, penyediaan fasilitas umum seperti toilet, area parkir, dan tempat istirahat, serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan di kawasan wisata. Di sisi lain, promosi wisata dilakukan melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional, dengan menonjolkan keunikan budaya, keindahan alam, dan daya tarik khas yang dimiliki setiap destinasi. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan,

memperkuat citra daerah sebagai tujuan wisata unggulan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Pembangunan SDM sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata.

Untuk rencana jangka panjang, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah berpedoman pada RIPPDA Aceh (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) melalui prinsip “*pro syariah, pro job, pro-growth, pro poor dan pro lingkungan*” yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi dalam pengembangan Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun Peluang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, pada kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2023 sampai dengan 2026 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. Branch image positif bagi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah
2. Adanya peningkatan promosi melalui berbagai media
3. Tumbuhnya industri Ekonomi kreatif berbasis iptek dan potensi lokal.

Potensi pariwisata perlu dikembangkan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisata domestic dan mancanegara. Hal ini dapat berpengaruh kepada penerimaan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata. Hal penting yang harus dibenahi adalah pengelolaan objek wisata secara professional dan mendapat dukungan masyarakat.

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah dinilai sangat efektif karena dimulai dari tingkat dasar dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, strategi tersebut dilanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi melalui penyusunan program kerja dan penyediaan fasilitas yang mendukung masyarakat. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga menjadikan Danau Laut Tawar sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Aceh Tengah.

Program Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata Aceh Tengah

Pembuatan program diperlukan untuk menentukan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu organisasi. Adapun program Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata dikawasan Danau Laut Tawar adalah terfokus pada Destinasi.

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah meliputi pelaksanaan visi, misi, serta program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tengah, yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, adalah menciptakan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Sasaran RPJM meningkatnya pendayagunaan Potensi Pariwisata dengan Strategi Peningkatan Promosi dan Citra Pariwisata. Dalam Rangka pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Pariwisata menjalankan program peningkatan Daya Saing kepariwisataan dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata

Diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan, peningkatan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa wisata.

2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Diarahkan untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara melalui promosi wisata.

3. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDMnya yang Kompeten, kredibel, dan Inovatif serta komunikatif melalui; (1) Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan wisata; (2) Peningkatan kompetensi tenaga kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi; (3) Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan ditingkat nasional dan internasional.

Pengembangan Infrastruktur di Daerah Tujuan Wisata Danau Laut Tawar

Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada setiap pengunjung atau wisatawan yang berkunjung.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, peran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan infrastruktur pariwisata dapat

dikategorikan baik. Hal ini karena Dinas Pariwisata menjalin koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan dinas lain, sehingga proses penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Aceh Tengah berjalan dengan baik dan cepat.

Dalam pengembangan infrastruktur, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah menerapkan konsep kolaborasi antar sektor. Kerja sama lintas sektoral ini penting untuk memperlancar penyelenggaraan pembangunan di sektor pariwisata. Selain fokus pada infrastruktur fisik, Dinas Pariwisata juga mulai mengembangkan infrastruktur sosial, salah satunya dengan membentuk kelompok sadar wisata.

Kelompok sadar wisata diperuntukkan agar masyarakat dapat mengelola sendiri obyek wisata yang berada di wilayah mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah seperti pemungutan retribusi, penataan parkir dan juga diharapkan dapat menjaga kebersihan disekitar obyek wisata. Pemerintah mendorong agar pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Aceh Tengah berbasis kesejahteraan warga sekitar objek wisata dan kelestarian alam. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah didorong kearah pengembangan yang berbasis kemasyarakatan karena pemerintah sadar bahwa obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah secara kepemilikan asset, beberapa adalah milik masyarakat setempat dan beberapanya lagi milik pemerintah, untuk asset milik masyarakat pemerintah hanya merupakan yang mempunyai kewenangan untuk menyediakan sarana-sarana yang diperlukan.

Kendala Yang dihadapi

Dalam merealisasikan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, maka Dinas Pariwisata tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Status lahan objek wisata belum memiliki dokumen yang jelas dan belum terdaftar dalam asset daerah
2. Ragam usaha dan kegiatan kepariwisataan masih terbatas
3. Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata belum optimal
4. Promosi dan pemasaran objek dan daya tarik pariwisata masih terbatas
5. Kreatifitas masyarakat dalam menciptakan produk kerajinan yang berwawasan ekonomi kreatif masih rendah
6. Persepsi negatif terhadap pariwisata oleh kelompok masyarakat tertentu
7. Lemahnya koordinasi antar lintas sector

8. Ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas, seperti: akomodasi, restoran, angkutanwisata, souvenir, *money changer*, *travel biro*, pramuwisata.
9. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technologi/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata.

Menurut penulis, berbagai kendala yang telah disebutkan sebelumnya memberikan dampak yang signifikan terhadap setiap tahap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mencari solusi atas kendala-kendala tersebut, sehingga pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan potensi yang besar sebagai daya tarik wisata unggulan. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah telah menerapkan berbagai strategi untuk mengembangkan sektor ini, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kualitas infrastruktur, serta promosi intensif baik melalui media digital maupun konvensional. Melalui strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat citra daerah, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Rencana jangka panjang, dengan berpedoman pada RIPPDA Aceh, mencakup peningkatan promosi pariwisata, pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Meskipun begitu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya infrastruktur, kurangnya dokumen legalitas lahan, serta rendahnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan produk kerajinan berbasis ekonomi kreatif.

Sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, beberapa upaya perlu dilakukan. Pertama, pengembangan infrastruktur yang memadai, baik fisik maupun sosial, harus menjadi prioritas utama. Penyediaan akomodasi, transportasi, serta fasilitas publik yang berkualitas dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperlancar akses menuju objek wisata. Kedua, pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan masalah status lahan objek wisata

dengan memastikan legalitasnya agar pengelolaan dapat dilakukan secara lebih profesional dan terorganisir.

Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat juga harus diperkuat. Masyarakat lokal harus diberdayakan sebagai pelaku utama dalam sektor pariwisata, dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam layanan wisata dan produk lokal. Peningkatan promosi dan pemasaran juga sangat penting, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk memperkenalkan potensi wisata daerah harus lebih maksimal. Selain itu, kreativitas masyarakat dalam menghasilkan produk kerajinan berbasis ekonomi kreatif perlu terus didorong melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif. Terakhir, pengelolaan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan dan ramah lingkungan harus terus dipromosikan, dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dan pelestarian sumber daya alam serta budaya lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengembangan pariwisata di Aceh Tengah dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ashoer, M., et al. (2021). *Ekonomi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Burgess, S., et al. (2011). Trust perceptions of online travel information by different content creators: Some social and legal implications. *Information Systems Frontiers*, 13(2), 221–235. <https://doi.org/10.1007/s10796-009-9192-x>
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
- Dredge, D., & Jenkins, J. (2017). *Tourism planning and policy*. Routledge.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(2), 1–12.
- Kemendagri. (2023). Siaran pers: Menparekraf paparkan realisasi program dan anggaran tahun 2023 di hadapan Komisi X DPR. Diakses dari <https://bob.kemendagri.go.id/367338-siaran-pers-menparekraf-paparkan-realisasi-program-dan-anggaran-tahun-2023-di-hadapan-komisi-x-dpr>
- Khairunnisa, A. (2020). Implementasi pariwisata berkelanjutan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat perspektif Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pitana, I. G. (2015). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat: Konsep, strategi, dan

implementasi. Andi Offset.

Renstra. (2023). Renstra Dinas pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026. Aceh Tengah. Diakses dari https://dispar.acehtengahkab.go.id/media/2024.07/renstra_dinas_pariwisata_2023-20261.pdf

Sudarso, A., et al. (2020). Konsep E-bisnis. Yayasan Kita Menulis.

Sutiarso, M. A. (2017). Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui ekowisata. Sulawesi Tenggara.

UNWTO. (2020). Tourism highlights. UNWTO.

Walker, R. J. (2017). Introduction to hospitality management (5th ed.). Pearson Education, Inc.